

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Permasalahan**

Reformasi Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI) merupakan suatu proses yang berkesinambungan dalam membangun dan memperkuat identitas, merealisasi pengkarakteran misi di semua jajaran, meningkatkan efisiensi dan efektivitas struktur organisasi, mengembangkan instrumen dan fasilitas pelayanan, serta memperbaiki budaya dan etika profesi secara konsisten. Semua proses tersebut dilakukan sebagai wujud kesiapan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI) dalam menghadapi masa depan yang semakin kompleks dengan tuntutan masyarakat yang demokratis, maka Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI) mereformasi pola kerja dan perilaku untuk mewujudkan organisasi yang diharapkan semua pihak berdasarkan nilai-nilai antara lain : (1) memiliki keunggulan yang berorientasi pada prestasi, dedikasi, dan kreativitas, (2) adanya Integritas yang berorientasi pada komitmen menjunjung tinggi nilai etik dan moral, (3) Akuntabilitas berorientasi pada sistem yang dapat ditelusuri jalurnya yang logis dan dapat di audit serta diperbaiki, mulai dari tingkat individu sampai institusi Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI) ,(4) Transparansi berorientasi pada keterbukaan, kepercayaan, menghargai keragaman dan perbedaan serta tidak diskriminatif, serta (5) Keberlanjutan orientasi kepada perbaikan secara terus menerus dan masa depan.

Reformasi Birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI) telah menyampaikan Dokumen Usulan, dan RoadMap Pelaksanaan Reformasi Birokrasi kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tanggal 15 Januari 2013 sebagai prasyarat utama bagi semua Kementrian/Lembaga Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi untuk melakukan perubahan dan pembaharuan. Demikian juga menurut Hussein Lufunyo dalam hasil penelitiannya “*impact of public sector reforms on service delivery in Tanzania*” berkesimpulan bahwa reformasi birokrasi yang menangani pelayanan sector publik berdampak positif terhadap kualitas pelayanan kepada warga negara. Komitmen tersebut diwujudkan dengan ditetapkan dan disosialisasikannya konsep reformasi dibidang struktural, instrumental dan kultural.

Bahwa dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI), diperlukan berbagai upaya untuk meningkatkan komitmen pimpinan dan pegawai melalui sosialisasi Reformasi Birokrasi, agar terjadi perubahan pola pikir dan budaya kerja. Sehingga dengan rumusan ini Reformasi Birokrasi merupakan salah satu cara meningkatkan kepedulian bagi seluruh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan BPN RI, sekaligus mekanisme kontrol publik terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di BPN RI.

Sesuai dengan amanat dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi (RB) 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang *Road Map* RB 2010-2014 serta 9 (sembilan) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 s/d 15 tahun 2011, disampaikan pelaksanaan RB BPN RI sebagai berikut:

1. Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI) telah menyerahkan Dokumen Usulan dan Road Map Pelaksanaan RB kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tanggal 15 Januari Tahun 2013, sebagai prasyarat utama bagi semua Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi termasuk BPN RI, untuk itu seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan BPN RI baik Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota agar segera memahami dan melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan RB sesuai dengan arahan dari Tim RB BPN RI, termasuk perubahan pola pikir, perilaku dan budaya lama menjadi pola pikir, perilaku dan budaya baru dan semangat baru yakni "Semangat perubahan melakukan Reformasi Birokrasi" yang dilandasi dengan Sapta Tertib Pertanahan dengan bersinergi pada semangat dalam mewujudkan pelaksanaan Sapta Pembaharuan BPN RI.
2. Dokumen Usulan dan Road Map Pelaksanaan RB BPN RI meliputi 9 program yang dijabarkan menjadi 27 kegiatan program serta "2 (dua) Program Percepatan "*Quick Wins* BPN RI. Adapun ke-9 Program tersebut meliputi:
  - 1) Program Manajemen Perubahan
  - 2) Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
  - 3) Program Penataan dan Penguatan Organisasi
  - 4) Program Penataan Tatalaksana

- 5) Program Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur
- 6) Program Penguatan Pengawasan
- 7) Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja
- 8) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan;
- 9) Program Monitoring dan Evaluasi; serta;

Program Percepatan "*Quick Wins* BPN RI" tersebut dilaksanakan mulai tahun 2013-2014 yaitu :

- a. Program Percepatan Pelayanan Pengecekan Sertipikat Tanah
- b. Program Percepatan Pelayanan Peralihan Hak Jual-Beli Atas Tanah,

Dimana hasil yang diharapkan adalah semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada Birokrasi BPN RI.

3. Proses pelaksanaan RB di lingkungan BPN RI dimulai dengan telah dibentuknya Tim Pengarah dan Tim Pelaksana RB oleh Kepala BPN RI dengan Keputusan Kepala BPN R.I Nomor 507/KEP-3.43/XI/2012 tanggal 22 November 2012 dan Keputusan Kepala BPN R.I. Nomor 497/KEP-3.43/XI/2012 tanggal 19 November 2012.
4. Untuk efektifitas dan efisiensi implementasi penilaian mandiri pelaksanaan RB sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB Nomor 1 Tahun 2012, telah dibentuk Tim Penilai Mandiri Pelaksanaan RB (Assesor) Tahun 2012 di lingkungan BPN R.I, yang mempunyai tugas :
  - a. Melakukan penilaian mandiri pelaksanaan RB di lingkungan BPN RI;
  - b. Menyediakan informasi mengenai perkembangan pelaksanaan RB dan upaya-upaya perbaikan yang perlu dilakukan oleh BPN RI; dan

c. Menyampaikan hasil penilaian dan data informasi lainnya kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi secara online.

5. Berkaitan dengan sosialisasi RB sebagai wujud peningkatan komitmen pimpinan dan pegawai agar mendorong terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja di lingkungan BPN RI, maka pemakaian PIN RB bersamaan dengan pemakaian seragam Pakaian Dinas Harian (PDH), yang pelaksanaannya sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 sebagaimana Keputusan Kepala BPN RI No.44/KEP-3.43/I/2013 tanggal 21 Januari 2013.

Berdasar dari latar belakang masalah diatas maka penulis menyusun tesis dengan judul : "Optimalisasi Program *Quick Wins* Dalam Pelayanan Pengecekan Sertipikat Untuk Mendukung Pelayanan Pertanahan Pada Kantor Pertanahan Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan judul diatas, dapat dirumuskan permasalahan pokok, yaitu: Bagaimana Optimalisasi Program *Quick Wins* Dalam Pelayanan Pengecekan Sertipikat Untuk Mendukung Pelayanan Pertanahan Pada Kantor Pertanahan Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara?

## **1.3. Maksud Penelitian**

Penulisan Tesis ini dimaksudkan untuk memberikangambaran tentang upaya-upaya yang dilakukan dalam mengoptimalisasi Program *Quick Wins* Dalam Pelayanan Pengecekan Sertipikat Untuk Mendukung Pelayanan Pertanahan Pada

Kantor Pertanahan Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara.

#### **1.4. Tujuan Penelitian**

Untuk menganalisis optimalisasi Program *Quick Wins* Dalam Pelayanan Pengecekan Sertipikat Untuk Mendukung Pelayanan Pertanahan Pada Kantor Pertanahan Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara

#### **1.5. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup dalam pembahasan Tesis ini dibatasi pada Implementasi Program *Quick Wins* Dalam Pelayanan Pengecekan Sertipikat Untuk Mendukung Pelayanan Pertanahan Pada Kantor Pertanahan Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara.

